

Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil di Kota Medan

Raniwati Siregar¹⁾; Marliyah²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uinsu, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: ¹⁾ Raniwatisiregar29@gmail.com; ²⁾ marliyah@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [12 Maret 2022]

Revised [8 April 2022]

Accepted [17 April 2022]

KEYWORDS

Effectiveness, Role, Cooperative, Development, Small Business

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan efektivitas pengembangan usaha kecil di Dinas Koperasi UKM Kota Medan dan Untuk mengetahui bentuk efektivitas pengembangan Koperasi dan usaha kecil menengah di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil Kota Medan. Dengan demikian, melalui penelitian kualitatif ini peneliti berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil Kota Medan. Pemerintah Daerah beserta Dinas Koperasi dan UKM bekerjasama untuk mengembangkan kemajuan UMKM Kota Medan. Oleh karena itu tugas yang utama dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan ialah melakukan otonomi daerah dalam melakukan semua tugas membantu yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi. Adapapun konsekuensi dari kegiatan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM wajib melaksanakan segala program kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan potensi sektor UKM terutama di Kelurahan Kota Medan.

ABSTRACT

This study aims to determine the role and effectiveness of small business development in the Department of Cooperatives and SMEs in Medan City and to determine the effectiveness of developing cooperatives and small and medium enterprises in the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Medan City. This study uses a qualitative method, in which the researcher wants to know how the Effectiveness of the Role of Cooperatives in the Development of Small Business in Medan City is. Thus, through this qualitative research, the researcher tries to describe the problems that exist in relation to the Effectiveness of the Role of Cooperatives in the Development of Small Business in Medan City. The Regional Government along with the Cooperatives and SMEs Office work together to develop the progress of Medan City SMEs. Therefore, the main task of the Medan City Cooperatives and SMEs Service is to carry out regional autonomy in carrying out all the assisting tasks that have been given by the central government and from the provincial government. As for the consequences of these activities, the Department of Cooperatives and SMEs are obliged to carry out all program activities that aim to increase the potential of the SME sector, especially in the urban village of Medan..

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai badan usaha diarahkan dan didorong untuk ikut berperan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Sehingga koperasi memiliki andil besar sebagai wadah kegiatan perekonomian rakyat. Jadi, dihadapan pemerintah koperasi mendapat tempatnya tersendiri untuk kemajuan dan perkembangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari penjelasan tersebut koperasi tidak hanya sebagai organisasi ekonomi tapi jelas dinyatakan sebagai badan usaha, sehingga diartikan bahwa koperasi sama dengan badan usaha lain seperti CV, Firma, dan Perseroan Terbatas (PT). Hanya yang membedakan pada tata cara kerjanya mencapai tujuan masing-masing.

Menurut Muhammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela kepentingan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Menurut International Labour Organization (ILO) mendefinisikan koperasi adalah suatu perkumpulan terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara ikhlas untuk memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul resiko dan turut mengecap keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut timbangan yang ideal.

Jadi bisa kita pahami bahwa pengertian koperasi, sebagai sebuah usaha atau pergerakan adalah untuk memberikan kesejahteraan ekonomi untuk masing-masing anggota. Secara tidak langsung, pengertian koperasi serupa dengan makna Cooperation.

Kebijakan pengembangan bisnis UKM untuk diimplementasikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan merupakan dari program pengembangan. Program ini berorientasi pada kebutuhan nyata UKM dengan memprioritaskan kepada peningkatan efisiensi dan daya saing sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memberi nilai tambah (Value Added).

Koperasi dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang antara lain, terjelma dalam pemerataan pendapatan di masyarakat melalui pertumbuhan koperasi-koperasi yang sehat. Dalam perkembangan koperasi masih menghadapi masalah-masalah di Bidang kelembagaan maupun dibidang usaha koperasi. Masalah tersebut bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar.

Kesejahteraan masyarakat yang luas dan bersama merupakan dasar dari pengembangan koperasi Indonesia. Suatu keyakinan yang muncul bahwa koperasi yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya akan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kesejahteraan masyarakat luas dapat diwujudkan antara lain bila kesengsaraan ekonomis dan derajat hidup kalangan miskin dan lemah dapat dihilangkan. Pengangguran dapat dicegah, dieksploitasi ekonomis dapat dihindarkan secara terus menerus.

Meningkatkan kemampuan pelaku UKM dalam mengakses sumber pembiayaan, meningkatkan kuantitas dan kualitas melalui pelatihan berwirausaha, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembiayaan bagi UKM, memberikan fasilitas dan dukungan bagi lembaga keuangan dalam memberikan layanan pembiayaan UKM adalah strategi yang ditempuh untuk pengembangan UKM.

Pelaksanaan program pengembangan UKM dapat berhasil dan berdaya guna apabila :

Tujuan atau sasaran dan program tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Waktu penyelesaian program tersebut tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Program pengembangan UKM dapat memberikan manfaat yang besar terhadap UKM, terutama membantu UKM menyelesaikan permasalahannya (seperti permodalan, SDM, pemasaran, penggunaan teknologi, dll) serta meningkatkan daya saing UKM terhadap perkembangan globalisasi.

Dengan ketiga unsur tersebut, maka efektivitas pelaksanaan program pengembangan UKM dapat tercapai. Berhasilnya sasaran dari pengembangan UKM tersebut akan mampu meningkatkan daya saing UKM dengan produk dari negara lain dan meningkatkan kondisinya dari segi kualitas dan juga kuantitas. Sehingga UKM dapat berperan sebagai tulang punggung Kota Medan.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi salah satu kriteria berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Medan juga menemui masalah yang dapat menghambat perkembangan UKM berdasarkan pelayanan yang di beri Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan yaitu masalah yang dihadapi adalah akses permodalan UKM masih rendah, daya saing produk UKM untuk masuk ke Pasar yang lebih luas masih perlu ditingkatkan, lemahnya manajemen pelaku UKM khususnya pelaku usaha mikro yang pembukuannya belum terpisah antara rumah tangga dan usaha.

Pemerintah Daerah beserta Dinas Koperasi dan UKM bekerjasama untuk mengembangkan kemajuan UMKM Kota Medan. Oleh karena itu tugas yang utama dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan ialah melakukan otonomi daerah dalam melakukan semua tugas membantu yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi. Adapapun konsekuensi dari kegiatan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM wajib melaksanakan segala program kegiatan yang memiliki tujuan meningkatkan potensi sektor UKM terutama di Kelurahan Kota Medan.

LANDASAN TEORI

Peranan

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson In Vancevich dan Donnelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, Biasanya organisasi.

Fungsi maupun peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di negara Indonesia lumayan banyak dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya dan keamanan. Fungsi dan perannya dalam segi tersebut dapat meningkatkan pendapatan para masyarakat, dapat menanggulangi pengangguran juga kemiskinan serta pola urbanisasi yang ada saat ini. Meskipun fungsi dan peranan UMKM ini begitu penting akan tetapi, sampai saat ini masih belum ada deskripsi juga teori yang pantas untuk UMKM di Indonesia ini.

UMKM berpotensi sangat besar dalam perannya untuk menyerap tenaga kerja, dimana masih perlu terus menerus ditingkatkan dan dimaksimalkan. Oleh karena itu, UMKM harus didukung dengan penerapan aturan yang lebih kondusif, dengan tidak memberatkan para pelaku UMKM.

Konsep Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017: 134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi menapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program.. semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Sedangkan pendapat para ahli memiliki pendapat efektivitas sebagai sebuah konseptual yang memiliki urgensi yang mampu memberi sebuah deskripsi yang berkaitan dengan keberhasilan sebuah organisasi dalam meraih tujuan atau sasarannya, dan dapat diartikan juga bahwa efektivitas ialah ukuran seberapa besar tingkat pencapaian tujuan dari segala kagiatan yang telah dilakukan dan dibanding dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas menurut Berger Sikora adalah sebagai berikut:

1. Komitmen. Menurut Mowday dkk. (1983) komitmen diindikasikan antara lain dengan keinginan berusaha keras dalam bekerja, penerimaan nilai organisasi dan penerimaan tujuan organisasi.
2. Kompetensi. Kompetensi menurut Sutisno (2011) dapat diukur melalui indikator kompetensi, yaitu pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap.
3. Koordinasi. Duncan (dalam Steers, 1985: 53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas adalah terdiri atas pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi.

Pencapaian tujuan. Upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Karena itu, agar pencapaian tujuan akhir makin terjamin, diperlukan penahapan, baik dalam arti penahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun penahapan dalam arti periodisasinya.

Integrasi. Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi (Nazaruddin, 1994).

Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam maupun luar organisasi tenaga kerja. Adaptasi terdiri atas beberapa faktor: peningkatan, kemampuan, sarana dan prasarana.

Konsep Pengembangan

Menurut Simamora (2010:287), menyatakan pengembangan adalah proses jangka panjang untuk meningkatkan pabilitas dan motivasi karyawan agar dapat menjadi aset perusahaan yang berharga, mengemukakan pengembangan biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik, berpendapat bahwa program pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam organisasinya. Jadi proses pengembangan dalam konteks perusahaan sangatlah berpengaruh pada kinerja juga tingkat produktivitas Karyawan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil Kota Medan. Dengan demikian, melalui penelitian kualitatif ini peneliti berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Efektivitas Peran Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil Kota Medan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam dan tujuannya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan

interaksi suatu unit sosial. Lokasi penelitian dilakukan tepatnya di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara Jl. Jend Gatot Subroto, Km 5.5 No. 218 Kota Medan-20123. Data dikumpulkan dengan studi lapangan yakni Interview (wawancara) dan studi pustaka. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Tugas

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantu kepada daerah provinsi.

Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro, pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sesuai dengan lingkungannya.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Medan

Dalam menciptakan UMKM Kota Medan yang mengalami pertumbuhan bisnis secara signifikan peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan dalam pemberdayaan UMKM menjadi sebuah hal yang krusial dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Berikut peran dan program pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Medan :

Program Pemberdayaan Usaha Kecil

Temu kemitraan UMKM dengan lembaga Bank, Non Bank dan Usaha Kecil Program ini bertujuan untuk mengentaskan masalah permodalan yang dimiliki oleh UMKM di Kota Medan.

Temu konsultasi pelaksanaan bimbingan administrasi dan perizinan bagi UMKM program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha akan pentingnya Standar Operasional Produk (SOP) dalam menjalankan usaha agar administrasi dan perizinan yang dimiliki oleh UMKM sesuai dengan yang pemerintahan terapkan.

Pengadaan bantuan peralatan bagi pelaku usaha dalam hal pengembangan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk bantuan yang dibutuhkan oleh UMKM.

Pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal program ini bertujuan untuk menciptakan usaha yang menekankan pada kelestarian daerah yang menjadi tempat UMKM berdiri dalam hal ini yaitu daerah Kota Medan.

Pembinaan dan pengembangan usaha bagi UMKM Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam mempromosikan usahanya agar dapat lebih dikenal secara luas.

Efektivitas Pengembangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara

Menurut (Hasibuan, Harahap dan Purwoko) pengembangan usaha adalah tugas dan proses analitis tentang peluang pertumbuhan potensi, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang

pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang bersekala besar dan mapan terutama dibidang teknologi industri yang terkait “Pengembangan Usaha” istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan analisis dengan yang lain, perusahaan pihak ketiga. dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan satu sama lain keahlian, teknologi atau kekayaan intelektual untuk memperluas kapasitas mereka untuk mengidentifikasi, meneliti, menganalisis data membawa ke pasar bisnis baru dan produk baru, pengembangan bisnis terfokus pada implementasi dari rencana bisnis strategis melalui ekuitas pembiayaan, akuisisi/divestasi teknologi, produk dan lain-lain.

Adapaun Pengembangan UMKM sebagai berikut:

1. Kualitas Produk. Menurut American Society For Quality Control kualitas produk adalah keseluruhan kelengkapan dan karakteristik dari produk atau layanan yang memengaruhi kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan baik yang dinyatakan maupun tersirat. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi kehandalan, daya tahan, ketetapan, kemudahan operasi, dan perbaikan produk, serta atribut bernilai lainnya.
2. Diversifikasi Produk. Menurut Wahyu Sulistiyo Ningsih, 2020 upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui penganekaragaman produk, baik lewat pengembangan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada. Diversifikasi produk, menciptakan produk-produk baru sesuai segmentasi pasar yang dituju berdasarkan selera dan daya beli konsumen.
3. Produksi. Menurut Wahyu Sulistiyo Ningsih, produk adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula.
4. Keuntungan. Menurut Fikri et al., 2021 keuntungan adalah laba atau selisih nilai penjualan terhadap biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan atau memproduksi barang atau suatu jasa. Menurut (Tri Novianti Sihombing, Gustami Harahap, Khairul Saleh, 2019) keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis, terutama bagi pemilik bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk keuntungan yang di harapkan lebih banyak dalam bentuk finansial. Besarnya keuntungan yang telah ditetapkan sesuai dengan target yang diinginkan sesuai dengan batas waktunya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, dilaksanakan melalui pengawasan, pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM diseluruh Wilayah Kota Medan. Posisi penting Dinas Koperasi dan UKM memiliki peluang yang strategis dalam usaha meningkatkan dan memaksimalkan pemberdayaan koperasi dan UKM. Peluang-peluang ini juga mengandung berbagai tantangan yang pada saat bersamaan dan harus disikapi serta ditangani dengan sebaik-baiknya.

Dengan merujuk pada hasil analisis terhadap renstra Kementrian Negara Koperasi dan UKM, dan berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang bersifat transparan, responsif, efektif, efisien, partisipatif, akuntabel, terukur, dan berkeadilan, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Medan dalam melakukan proses identifikasi berbagai peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan juga melihat hasil analisis Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, guna menjamin rencana pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Uraian mengenai hasil analisis terhadap peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan adalah sebagai berikut:

Peluang

Perkembangan teknologi informasi (TI) menghadirkan inovasi dalam berusaha. Bonus demografi juga menjadikan masyarakat Indonesia Mayoritas bersifat native technology. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi koperasi di Indonesia untuk terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Bonus demografi menjadi penguang dalam percepatan perkembangan UMKM dan Koperasi di Indonesia. Saat ini di Kota Medan sendiri apabila merujuk pada lapora BPS Kota Medan dalam angka 2020, mayoritas anggota masyarakat kota Medan berada pada kelompok umur 20-24. Kelompok umur kedua terbanyak adalah kelompok umur 15-19. Hal ini dalam jangka panjang sangat menjanjikan pada perkembangan UMKM dan Koperasi asalkan bonus demografi ini dikelola dengan baik, alih-alih menjadi beban pembangunan.

Banyaknya rumah ibadah di Kota Medan yang dapat dijadikan potensi perkembangan koperasi yang berbasis umat.

Dengan jumlah populasi kelompok perempuan yang sangat tinggi yang saat ini berusia produktif (816.262 jiwa), hal ini dapat menjadi potensi yang dapat dimaksimalkan.

Mulai munculnya start-up yang dikelola anak muda, yang potensial apabila dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kota.

Tantangan

Permasalahan yang terus terjadi pada tahun ke tahun adalah terbatasnya SDM pengelolaan koperasi yang berkualitas seperti yang dicita-citakan Bapak Koperasi Indonesia: Muhammad Hatta. Hal ini berimbas pada stigma masyarakat yang beranggapan bahwa koperasi tidak lebih sebagai lembaga simpan pinjam.

Dengan bonus demografi anak muda yang sangat banyak, ketertarikan anak muda untuk turut memajukan koperasi masih sangat rendah. Perlu adanya usaha untuk meningkatkan ketertarikan anak muda terhadap dunia koperasi.

Koperasi masih bergantung kepada sumber-sumber pembiayaan eksternal. Padahal seharusnya sumber dana terbesar koperasi berasal pada keanggota-anggota koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Efektivitas pelaksanaan pengembangan UKM di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kota Medan sudah cukup baik tetapi masih terhambat oleh ketidak merataan sumber daya manusia, dinas keseluruhan Koperasi UKM.
2. Pelatihan dan Sosialisasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan dapat mengembangkan atau meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku UKM dalam melaksanakan usahanya.
3. Efektivitas dalam pengembangan dalam kaitannya dengan ukuran efektivitas, tindakan memfasilitasi pelaku UKM juga dapat dikatakan efektif apabila menyeluruh ke pelaku-pelaku UKM dan dijalankan sesuai dengan fungsinya.
4. Efektivitas kepemimpinan Kepala Koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Medan sangat berpengaruh terhadap jalannya tugas dan fungsi serta pemberdayaan pegeawainya.
5. Kemitraan yang dilaksanakan Dinas sudah efektif dan bermanfaat bagi keberlangsungan usaha pelaku UKM.

Saran

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dalam pengembangan usaha kecil menengah, maka efektivitas dalam pengembangan oleh Dinas Koperasi UKM Kota Medan harus diterapkan semaksimal mungkin.

Agar Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan dalam efisiensi melaksanakan Efektivitas Pengembangan UMK Kota Medan hendaknya didasarkan dengan rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Agar Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan lebih mendekatkan diri kepada para pelaku UKM dan dapat melaksanakan programnya secara maksimal. Dan dalam hal ini diperlukan juga kerja sama yang baik dan kompak sesama rekan kerja agar terlaksananya tujuan yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, Jumiati. (2020). Efektivitas Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Di Kelurahan Purus Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 4 hlm.
- Nur Inna Alfiyah. (2019). Peran Pemimpin Transformasional Dalam Penguatan Kelembagaan (Studi Kasus Koperasi UMKM Kabupaten Sumenep). *Journal of Governance Innovation*. Vol 1 No. 2. Hlm
- Anwar Pohan, M.Si.,MBA. (2021). Kebijakan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Tersedia dari NetLibrary Database
- Ni Nyoman Sunarian. AAN, dkk. (2017). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembinaan di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. Vol 2. No. 1
- Arman Maulana, S.Sy.,M.M. Siti Rosmayati,SST.,M.M. (2020). *Manajemen Koperasi*. Guepedia.
- Thoby Mutis. (1992). *Pengembangan Koperasi*. PT. Grasindo.